



Mahkamah Agung
Republik Indonesia

PERJANJIAN KINERJA

2020

www.mahkamahagung.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **A.S. PUDJOHARSOYO**

Jabatan : **SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 14 Januari 2020
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA


A.S. PUDJOHARSOYO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
MAHKAMAH AGUNG RI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	40%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:	
		1) Banding	90%
		2) Kasasi	75%
		3) Peninjauan Kembali	70%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	4%
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	76,6%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase penyelesaian minutası perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan	30%
		b. Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu	95%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase perkara permohonan (<i>voluntair</i>) identitas hukum 100%	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%
5	Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat secara transparansi, efektif dan efisien	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	100%
6	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif	a. Pesentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif	90%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		b. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	95%
		c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	95%
		d. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif	95%
7	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	90%
		c. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	90%

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp 8.723.644.945.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp 1.226.107.296.000
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	Rp 40.273.336.000
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	Rp 173.471.039.000
5	Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	Rp 172.033.639.000
6	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 148.038.623.000
7	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp 85.807.448.000
8	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Rp 28.551.651.000
JUMLAH		Rp 10.597.927.977.000

Jakarta, 14 Januari 2020

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

A.S. PUDJOHARSOYO